

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

👤 Kepala Pusat	: Iwan Agung Prasetyo
👤 Koordintor Pengembangan Pembinaan dan Fasilitas	: Sindu Senjaya Aji
👤 Koordinator Sertifikasi dan Pengelolaan Data	: Achmad Julianto
👤 Koordinator Program dan Evaluasi	: Mutia Rizal
👤 Kepala Sub Bagian Umum	: Aries Sulastowo

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Seiring dengan pelaksanaan *roll out* SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2022, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja telah sepenuhnya menggunakan SAKTI kelompok modul pelaporan (modul persediaan, modul asset tetap, modul piutang, serta modul *general ledger* dan pelaporan/GLP)

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017

dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

**Penyusutan Aset
Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 semula sebesar Rp21.432.754.000,00. Pada bulan Maret 2023 dilakukan revisi anggaran sehubungan adanya kegiatan yang didanai PHLN TA 2023 sebesar Rp1.037.754.000,00. Pada bulan Mei dilakukan revisi sehubungan optimalisasi anggaran dan tambahan anggaran hibah luar negeri sebesar Rp2.465.244.000,00. Pada bulan Agustus dilakukan revisi sehubungan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp415.945.000,00 dan pengurangan anggaran belanja modal yang berasal dari hibah luar negeri sebesar Rp880.088.000,00. Pada bulan September dilakukan revisi sehubungan tambahan anggaran pinjaman luar negeri sebesar Rp333.697.000,00 sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp22.594.635.000,00. Pada bulan Oktober dilakukan revisi sehubungan pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp46.231.000,00. Pada bulan November dilakukan revisi sehubungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran belanja dan saldo gaji & tunjangan *baseline* yang direvisi ke kantor pusat sebesar Rp1.044.891.000,00 dan *cost sharing* belanja barang sebesar Rp10.000.000,00 sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp23.583.295.000,00

Rincian Pagu Belanja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	17.053.304.000	4.379.450.000	0	21.432.754.000
Tambahan Anggaran PLN	0	918.954.000	0	918.954.000
Tambahan Anggaran HLN	0	188.800.000	2.395.244.000	2.584.044.000
Optimalisasi anggaran, Tambahan anggaran HLN dan pengurangan	(2.273.521.000)	1.700.000	61.150.000	(2.210.671.000)
Tambahan pegawai dan pengurangan belanja modal HLN	415.945.000	0	(880.088.000)	(464.143.000)
Tambahan anggaran PLN	0	333.697.000	0	333.697.000
Pengurangan belanja pegawai	(46.231.000)	0	0	0
Tambahan Belanja Pegawai (ABT) dan Saldo Gaji & Tunjangan Baseline yang direvisi Ke Kantor Pusat serta <i>Cost Sharing</i>	1.044.891.000	(10.000.000)	0	0
Anggaran Akhir	16.194.388.000	5.812.601.000	1.576.306.000	23.583.295.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Program Pengawasan Pembangunan	2.983.000.000	5.939.607.000
Program Dukungan Manajemen	18.449.754.000	17.643.688.000
Total	21.432.754.000	23.583.295.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp13.810.950

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.810.950,00. Keseluruhan Pendapatan Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.731.209,00 atau 67,54 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun

2022 sebesar Rp42.542.159,00 disebabkan menurunnya Penerimaan Kembali Belanja TAYL.

Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022

Uraian Jenis PNBPN	Realisasi PNBPN (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.000.999	0	5.000.999	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42.542.159	(42.542.159)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.783.951	0	7.783.951	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.026.000	0	1.026.000	-
Total	13.810.950	42.542.159	(28.731.209)	(67,54)

- ✓ Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp5.000.999,00 berasal dari lelang penjualan BMN Peralatan dan Mesin dengan Risalah Lelang nomor 216/27/2023 dan dengan nomor NTPN 406018N3EA5Q455D berupa 26 unit PC, 14 unit Notebook, 8 unit Printer, 6 unit Scanner dan 8 unit External/Portable Hardisk dalam kondisi rusak berat.
- ✓ Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7.783.951,00 merupakan pengembalian yang dilakukan oleh supplier atas selisih harga barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada pengadaan peralatan PC AIO Design iMac atas hasil pemeriksaan BPK.
- ✓ Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.026.000,00 merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran Honor UAKPA yang diterima bendahara yang menduduki jabatan fungsional perbendaharaan atas hasil pemeriksaan BPK.

Realisasi Belanja
Negara
Rp22.579.755.542

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp22.579.755.542,00 atau 95,75 persen dari anggaran

sebesar Rp23.583.295.000,00. Pengembalian belanja tahun 2023 sebesar Rp12.440.110,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2023

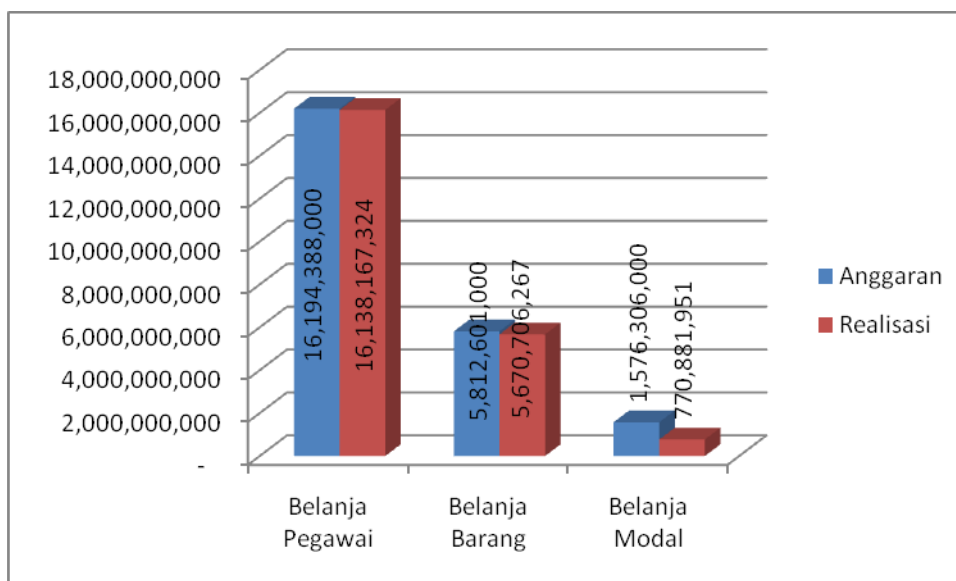
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CH	Program Pengawasan Pembangunan	5.939.607.000	4.997.083.213	84,13
WA	Program Dukungan Manajemen	17.643.688.000	17.582.672.329	99,65
Jumlah		23.583.295.000	22.579.755.542	95,74

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja TA 2023

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	16.1943.88.000	16.138.167.324	99,65
52	Belanja Barang	5.812.601.000	5.670.706.267	97,56
53	Belanja Modal	1.576.306.000	770.881.951	48,90
Jumlah		23.583.295.000	22.579.755.542	95,74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.507.058.411,00 atau 7,15% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2022 disebabkan meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69
52	Belanja Barang	5.670.706.267	4.878.800.009	791.906.258	16,23
53	Belanja Modal	770.881.951	1.208.629.209	(437.747.258)	(36,22)
	Total	22.579.755.542	21.072.697.131	1.507.058.411	7,15

Belanja Pegawai
Rp16.138.167.324

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.138.167.324,00 dan Rp14.985.267.913,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj PNS	6.696.919.000	6.647.590.602	99,26
Belanja Lembur	62.000.000	61.868.000	99,79
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	9.435.469.000	9.428.708.722	99,93
Total	16.194.388.000	16.138.167.324	99,65

Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp16.138.167.324,00 berasal dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp16.150.047.434,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp11.880.110,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2022, terdapat peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.152.899.411,00 atau 7,69 persen disebabkan adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai serta kenaikan tunjangan kinerja pegawai yang mempengaruhi peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja .

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.647.590.602	6.910.458.446	262867844	3,80
Belanja Lembur	61.868.000	78.967.000	17.099.000	21,65
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	9.428.708.722	7.995.842.467	1.432.866.255	17,92
Total	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69

Belanja Barang
Rp5.670.706.267

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.670.706.267,00 dan Rp4.878.800.009,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2023 disajikan

pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	484.292.000	482.788.641	99,69
Belanja Barang Non Operasional	664.728.000	648.201.168	97,51
Belanja Barang Persediaan	59.243.000	58.215.309	98,27
Belanja Jasa	305.100.000	205.200.000	67,26
Belanja Pemeliharaan	214.178.000	211.967.517	98,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.085.060.000	4.064.333.632	99,49
Total	5.812.601.000	5.670.706.267	97,56

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp5.670.706.267,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp5.671.266.267,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp560.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2022, terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang sebesar Rp791.906.258,00 atau 16,23 persen antara lain disebabkan meningkatnya belanja barang operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas sehubungan pelaksanaan tupoksi Pusbin JFA.

Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	482.788.641	442.451.216	40.337.425	9,12
Belanja Barang Non Operasional	648.201.168	1.147.770.970	(499.569.802)	(43,53)
Belanja Barang Persediaan	58.215.309	80.400.933	(22.185.624)	(27,59)
Belanja Jasa	205.200.000	196.834.951	8.365.049	4,25
Belanja Pemeliharaan	211.967.517	184.176.597	27.790.920	15,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.064.333.632	2.827.165.342	1.237.168.290	43,76
Total	5.670.706.267	4.878.800.009	791.906.258	16,23

Dalam realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp5.670.706.267,00 termasuk realisasi dari Pinjaman dan Hibah

Luar Negeri sebesar Rp1.243.983.243,00 atau 21,94% dari total realisasi Belanja Barang dan realisasi Hibah Luar Negeri sebesar Rp 97.200.000,00 atau 1,71% dari total realisasi Belanja Barang.

Belanja Modal
Rp770.881.951

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp770.881.951,00 dan Rp1.208.629.209,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.150.000	61.100.000	99,92
Belanja Modal Lainnya	1.515.156.000	709.781.951	46,85
Total	1.576.306.000	770.881.951	48,90

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp437.747.258,00 atau 36,22 persen antara lain disebabkan lamanya proses pengadaan konsultan untuk *Development of AAPI Web-Based Peer Review* dan *Development of Online Learning Modules at AAPIs Enterprise Learning Management System*. Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.100.000	582.808.009	(521.708.009)	(89,52)
Belanja Modal Lainnya	709.781.951	625.821.200	83.960.751	13,42
Total	770.881.951	1.208.629.209	(437.747.258)	(36,22)

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp770.881.951,00 telah dicatat sebagai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.100.000,00 dan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp709.781.951,00.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp23.172.640

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.172.640,00 dan Rp33.274.479,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Aset Lancar	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1.	Persediaan	23.172.640	33.274.179
	Jumlah	23.172.640	33.274.179

Persediaan
Rp23.172.640

C.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp23.172.640,00 dan Rp33.274.179,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Kode	Jenis Persediaan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	23.172.640	76.509.645
	Jumlah	23.172.640	33.274.179

Persediaan senilai Rp23.172.640,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp1.772.419.245

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.772.419.245,00 dan Rp1.153.378.847,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.116.334.659	5.751.971.853
	Akumulasi Penyusutan	(5.343.915.414)	(4.770.343.586)
	Nilai Buku	1.772.419.245	1.153.378.847

Peralatan dan
Mesin
Rp7.116.334.659

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp7.116.334.659,00 dan Rp5.923.722.433,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.772.419.245,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.923.722.433
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	61.100.000
- Transfer Masuk	1.131.512.226
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.116.334.659
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(5.343.915.414)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.772.419.245

- ✓ Pembelian sebesar Rp61.100.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	HP Printer Ink Tank (Print, Scan, Copy) All In One	4	8.400.000
2.	Smart TV 65 Inch	1	12.500.000
3.	Interactive Whiteboard/Educatic	1	21.500.000
4.	Loker 4 Pintu	1	2.000.000
5.	Logitech Spotlight Pointer Presenter Advanced Wirekess/Bluetooth	3	5.100.000
6.	Logitech BCC950 Conference Cam	1	3.000.000
7.	Router	1	8.600.000
Jumlah		12	61.100.000

- ✓ Transfer Masuk sebesar Rp1.131.512.226.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang diterima dari Biro Umum BPKP pada

bulan Desember tahun 2023, sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1.	P.C. Unit	17	307.832.226
2.	Notebook	44	823,680,000
Jumlah		61	1.131.512.226

- ✓ Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp39.686.300,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	37.986.300
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	1.700.000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	39.686.300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(22.001.092)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	17.685.208

Pembelian sebesar Rp1.700.000,00 berupa realisasi belanja barang untuk 2 unit Voice Recorder.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp5.343.915.414)

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.343.915.414,00 dan Rp4.770.343.586,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.116.334.659	5.343.915.414	1.772.419.245
	Jumlah	7.116.334.659	5.343.915.414	1.772.419.245

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 31/12/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.770.343.586	5.343.915.414	573.571.828	573.571.828	0
	Total	4.770.343.586	5.343.915.414	573.571.828	573.571.828	0

Aset Lainnya
Rp1.100.920.202

C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.100.920.202,00 dan Rp566.586.927,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	1.889.112.550	1.889.112.550
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	709.781.951	0
	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(1.497.974.299)	(1.322.525.623)
	Nilai Buku	1.100.920.202	566.586.927

Aset Tak Berwujud
Rp1.889.112.550

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.889.112.550,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.497.974.299,00 dan Rp1.322.525.623,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp391.138.251,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.889.112.550
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.889.112.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.497.974.299)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	391.138.251

*Aset Tak
Berwujud Dalam
Pengerjaan
Rp709.781.951*

C.3.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp709.781.951,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	
- <i>Development of AAIPI Web-Based Peer Review</i>	302.700.000
- <i>Development of Online Learning Modules at AAIPIs Enterprise Learning Management System</i>	407.081.951
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	709.781.951

Mutasi tambah berupa *Development of AAIPI Web-Based Peer Review* dan *Development of Online Learning Modules at AAIPIs Enterprise Learning Management System*, sampai dengan akhir tahun 2023 masih dalam proses pengerjaan oleh konsultan yang bersumber dana dari hibah Multi Donor Trust Fund (MDTF).

*Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.497.974.299)*

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.497.974.299,00 dan Rp1.322.525.623,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional kantor karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset

tersebut. Saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri atas:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.497.974.299	1.322.525.623
	Total	1.497.974.299	1.322.525.623

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023	Mutasi (Rp)	Beban Amortisa (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Akum Amort ATB	1.322.525.623	1.497.974.299	175.447.676	175.447.676	0
	Total	1.322.525.623	1.497.974.299	175.447.676	175.447.676	0

Ekuitas
Rp2.896.512.087

C.4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.896.512.087,00 dan Rp1.753.239.953,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp22.567.995.634)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp22.567.995.634,00 dan minus Rp20.830.193.442,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp22.567.995.634,00.

Pendapatan
Operasional
Rp0,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp0,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00.

Beban Operasional
Rp22.567.995.634

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.567.995.634,00 dan Rp20.830.193.442,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69
Beban Persediaan	68.316.848	123.312.399	(54.995.551)	(44,60)
Beban Barang dan Jasa	1.336.189.809	1.788.755.437	(452.565.628)	(25,30)
Beban Pemeliharaan	211.967.517	184.500.597	27.466.920	14,89
Beban Perjalanan Dinas	4.064.333.632	2.827.165.342	1.237.168.290	43,76
Beban Penyusutan dan Amortisasi	749.020.504	921.191.754	(172.171.250)	(18,69)
Total	22.567.995.634	20.830.193.442	1.737.802.192	8,34

Beban Pegawai
Rp16.138.167.324

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.138.167.324,00 dan Rp14.985.267.913,00. Kenaikan Beban Pegawai tersebut karena adanya penambahan jumlah pegawai, mutasi dari unit lain BPKP ke Pusbin JFA serta adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	6.647.590.602	6.910.458.446	262.867.844	3,80
Beban Lembur	61.868.000	78.967.000	17.099.000	21,65
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	9.428.708.722	7.995.842.467	1.432.866.255	17,92
Total	16.138.167.324	14.985.267.913	1.152.899.411	7,69

Realisasi beban pegawai menurut LO Tahun 2023 sama dengan realisasi belanja pegawai menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Persediaan
Rp68.316.848

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68.316.848,00 dan Rp123.312.399,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	68.316.848	123.312.399	(54.995.551)	(44,60)
Total	68.316.848	123.312.399	(54.995.551)	(44,60)

Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp58.215.309,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp68.316.848,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2023. Dengan demikian terdapat selisih sebesar

Rp10.101.539,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang Persediaan
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan konsumsi	68.316.848	-	68.316.848
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	58.215.309	(58.215.309)
Total	68.316.848	58.215.309	10.101.539

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.336.189.809*

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.336.189.809,00 dan Rp1.788.755.437,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	482.788.641	442.451.216	40.337.425	9,12
Beban Barang Non Operasional	648.201.168	1.147.770.970	(499.569.802)	(43,53)
Beban Jasa	205.200.000	196.834.951	8.365.049	4,25
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	1.698.300	(1.698.300)	(100)
Total	1.336.189.809	1.788.755.437	(452.565.628)	(25,30)

Realisasi menurut LO tahun 2023 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama sebesar Rp1.336.189.809,00.

Beban
Pemeliharaan
Rp211.967.517

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp211.967.517,00 dan Rp184.500.597,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.967.517	184.176.597	27.466.920	14,89
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	324.000	(324.000)	(100)
Total	211.967.517	184.500.597	27.142.920	14,71

Realisasi menurut LO tahun 2023 sama dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp4.064.333.632

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.064.333.632,00 dan Rp2.827.165.342,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	3.194.124.178	1.717.392.489	1.476.731.689	85,99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	196.875.000	303.980.000	(107.105.000)	(35,23)
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	235.797.000	471.452.250	(235.655.250)	(49,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	437.537.454	334.340.603	103.196.851	30,87
Total	4.064.333.632	2.827.165.342	1.237.168.290	43,76

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sama dengan realisasi Belanja menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp749.020.504

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp749.020.504,00 dan Rp921.191.754,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	573.571.828	603.463.598	(29.891.770)	(4,95)
Beban Amortisasi Software	175.448.676	317.728.156	(142.279.480)	(44,78)
Total	749.020.504	921.191.754	(172.171.250)	(18,69)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp13.810.950

D.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.810.950,00 dan Rp42.542.159,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp13.810.950,00 tersebut merupakan surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.000.999,00 dan surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya sebesar Rp8.809.951,00

Surplus/Defisit
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp5.000.999

D.2.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.000.999,00 dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.000.999,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,00.

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp5.000.999

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.000.999,00 dan Rp0,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.000.999,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari lelang penjualan BMN Peralatan dan Mesin dengan Risalah Lelang nomor 216/27/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindah-tanganan BMN Lainnya	5.000.999	-	5.000.999	-
Total	5.000.999	-	5.000.999	-

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp8.809.951

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.809.951,00 dan Rp42.542.159,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp8.809.951,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.809.951,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp8.809.951

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.809.951,00 dan Rp42.542.159,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42.542.159	(42.542.159)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.026.000	0	1.026.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.783.951	0	7.783.951	-
Total	8.809.951	42,542.159	(33.732.208)	(79,29)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.753.239.953

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.753.239.953,00,00 dan Rp2.007.898.407,00.

*Surplus/(Defisit)
LO*
(Rp22.554.184.684)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp22.554.184.684,00 dan Rp20.787.651.283,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp22.554.184.684,00 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp13.810.950,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

*Transaksi Antar
Entitas*
Rp23.697.456.818

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.697.456.818,00 dan Rp20.532.992.829,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.579.755.542	21.072.697.131
Diterima dari Entitas Lain	(13.810.950)	(42.542.159)
Transfer Masuk	1.131.512.226	0
Transfer Keluar	0	(497.162.143)
Total	23.697.456.818	20.532.992.829

*Ditagihkan ke
Entitas Lain*
Rp22.579.755.542

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.579.755.542,00 dan Rp21.072.697.131,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

*Diterima dari
Entitas Lain*
Rp13.810.950

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.810.950,00 dan Rp42.542.159,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi

penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Transfer Masuk
Rp1.131.512.226

E.3.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.131.512.226,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset yang diterima dari satuan kerja di lingkungan BPKP, berupa Peralatan dan Mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengirim	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Biro Umum	1.131.512.226	0	1.131.512.226
Jumlah	1.131.512.226	0	1.131.512.226

Transfer Keluar
Rp0

E.3.4. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp497.162.143,00.

Ekuitas Akhir
Rp2.896.512.087

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.896.512.087,00 dan Rp1.753.239.953,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp2.896.512.087,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp0,00.

*Biaya Bantuan
Kedinasan*

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Tidak terdapat realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2023.

F. 2 Informasi Data Pinjaman Luar Negeri

F.2.1. Latar Belakang

State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF) ADB LOAN NO . 3872-INO merupakan proyek lanjutan kerjasama pemerintah Indonesia dan ADB yang dikelola oleh BPKP selaku Executing Agency (EA), dengan tujuan dalam rangka melanjutkan penguatan akuntabilitas sektor publik yang telah dilaksanakan sebelumnya selama periode Februari 2013 sampai dengan Maret 2020 melalui proyek STAR ADB Loan No. 2927-INO. Sumber daya manusia berkualitas di bidang pengelolaan keuangan negara dan internal audit yang terbangun pada proyek STAR sebelumnya akan didukung dengan pengembangan infrastruktur IT dalam mempercepat pelaksanaan proses bisnis pengelolaan keuangan dan internal audit. Selain itu, STAR AF juga bermanfaat untuk mengantisipasi tuntutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam hal tata kelola, proses bisnis, monev, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, fungsi pengelolaan keuangan negara dan audit internal dapat lebih terjamin dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah (Public Finance Management - PFM) yang bersih dan berkualitas.

F.2.2. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF) ADB LOAN NO . 3872-INO selama periode 2020-2025 memiliki tiga komponen output, yaitu: (1) capacity of government's internal auditors and public finance officers developed; (2) competency and needs-based e-learning approach

institutionalized; dan (3) institutional strengthening through system improvement. Berkaitan dengan komponen output di atas, terdapat dua poin penting dari penyelenggaraan STAR AF, yang juga relevan dalam melanjutkan pemanfaatan capaian proyek STAR, yaitu:

1. Melanjutkan pengembangan inovasi yang mendukung penguatan peran pembinaan BPKP melalui penerapan organisasi pembelajar bagi APIP dan PKN yang selaras dengan kebutuhan organisasi publik dalam mencapai strategi dan tujuannya. Inovasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan GIA Corpu. Capaian STAR berupa pengembangan dan penyelenggaraan Regol (registrasi online) dan e-learning yang merupakan bagian dari proses bisnis learning value chain (LVC) GIA Corpu pada tahap program delivery, dilanjutkan di STAR AF dengan pengembangan secara terintegrasi dari seluruh proses bisnis LVC GIA Corpu, mencakup: (1) learning need diagnostic (mencakup core competency analysis (CCA), developmental need analysis (DNA), training need analysis); (2) desain & pengembangan pembelajaran; (3) penyelenggaraan & implementasi pembelajaran melalui training dan sertifikasi JFA dan non JFA serta diklat teknis substansi; dan (4) evaluasi & pengukuran dampak pembelajaran. Selain itu, capaian STAR lainnya berupa hasil pengembangan SIBIJAK dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan training need analysis GIA Corpu, yaitu dengan memanfaatkan layanan pusat data auditor SIBIJAK untuk mengidentifikasi dan memetakan gap competency APIP tiap K/L/P secara terupdate.
2. Melanjutkan pengembangan inovasi yang mendukung penguatan peran pengawasan sektor publik, yaitu meningkatkan implementasi pengelolaan risiko dan memanfaatkan ICT dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran sektor publik. Pengembangan pengelolaan risiko sektor publik yang didanai STAR AF ini selaras dengan peran BPKP dalam

melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pada pengawasan keuangan, penerapan pengelolaan risiko direalisasikan melalui pengembangan FMIS-NG yang berbasis web dan mengintegrasikan seluruh sub-sistemnya serta melengkapinya dengan pengembangan sistem continuous monitoring (CM) bagi user di first line dan second line dalam menerapkan pendekatan three lines of defense. Penerapan CM diharapkan akan meningkatkan process improvement pengelolaan keuangan sektor publik di level manajemen. Sementara, penerapan continuous audit (CA) untuk memastikan efektifitas pengelolaan risiko oleh manajemen K/L/P, sekaligus meningkatkan peran APIP sebagai third line, dilakukan melalui pengembangan data warehouse dan pengembangan sistem continuous audit (CA). Pengembangan sistem CA ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan data analytic di internal audit yang pada akhirnya meningkatkan business intelligence pengawasan sektor publik. Bagi BPKP, diharapkan dengan adanya pengembangan data warehouse FMIS NG dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas big data SIMA dan meningkatkan penerapan business intelligence pengawasan BPKP atas pengelolaan pengeluaran keuangan pemerintah daerah secara nasional, serta memperkuat kualitas rekomendasi kepada Presiden RI.

Pada pengawasan program pembangunan, penyelenggaraan STAR AF diarahkan untuk meningkatkan penguatan Capaian STAR yang mencakup pedoman penerapan pengelolaan risiko untuk pemerintah daerah, serta pedoman pengawasan berbasis risiko. Dalam hal ini, capaian STAR dilanjutkan pemanfaatannya melalui: (i) pengembangan sistem informasi pengelolaan risiko yang selaras dengan enterprise architecture (EA) BPKP dan kebijakan SPBE nasional; (ii) pengembangan pengelolaan risiko pada program prioritas pembangunan

nasional 2020-2024; (iii) pengembangan pengukuran maturitas penerapan manajemen risiko sektor publik; dan (iv) pengembangan kompetensi teknis ICT dan pengelolaan risiko. Penerapan pengelolaan risiko pada program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan penerapan performance-based budgeting (PBB) pada proses bisnis perencanaan-penganggaran yang berorientasi pada capaian outcome (hasil), dan peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di seluruh proses pengelolaan keuangan negara/daerah (PFM). Pada akhirnya, diharapkan penerapan pengelolaan risiko sektor publik dapat meningkatkan penerapan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengeluaran keuangan pemerintah.

STAR AF diharapkan berkontribusi secara langsung melalui upaya-upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana tercermin dalam target Rencana Strategis BPKP dan RPJMN 2020-2024 dan diharapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas laporan keuangan baik pusat maupun daerah sebagaimana tertuang dalam Project Administration Manual (PAM) STAR AF, yaitu opini WTP BPK di tahun 2025 sebesar 97% untuk K/L, 97% untuk provinsi, 90% untuk kabupaten/kota; Indeks Maturitas SPIP level 3 di tahun 2025 sebesar 100% untuk K/L dan pemerintah daerah; dan Peningkatan indeks kapabilitas APIP level 3 di tahun 2025 sebesar 85% untuk K/L dan Pemerintah daerah.

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri BPKP

Data umum dari masing-masing satuan kerja penerima PHLN adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama PHLN	<i>State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF)</i>
2	Pemberi Pinjaman	<i>Asian Development Bank (ADB)</i>
3	Nama Proyek	<i>State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF)</i>
4	Loan ID	3872-INO
5	No. Register	17JE53EA
6	<i>Date Sign</i>	09 Desember 2019
7	<i>Date Effective</i>	15 Januari 2020
8	<i>Closing Date</i>	30 September 2015
9	<i>Loan Amount</i>	USD 90.000.000,00
10	<i>Disbursement s.d. 2023</i>	Rp4.221.813.641,00
11	<i>Disbursement pada tahun 2023</i>	Rp1.243.983.243,00
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)/ Realisasi Netto	Rp1.243.983.243,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp1.243.983.243,00
	c. Belanja Modal	Rp0,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp479.881.403,00
	c. Aset Lainnya	Rp614.402.630,00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	<i>Executing Agency</i>	Sekretaris Utama BPKP
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

F. 3 Informasi Data Hibah Luar Negeri

F.3.1. Latar Belakang

Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) II yang dimulai pada bulan Maret 2016 dengan nilai *Grant Agreement* TF0A1903, sebesar USD 2,700,000, sepanjang perjalanan programnya telah melakukan realisasi penggunaan dana sebesar 81.11% atau sekitar USD 2,190,000 untuk membiayai 4 pilar Utama yang dijalankan oleh 7 Unit Kementerian/Lembaga. PFM-MDTF II dinyatakan selesai secara keseluruhan pada bulan Agustus 2020 dengan pemberian rating “*Satisfactory*” dalam laporan *Implementation Completion Report* (ICR) yang disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Tiga jenjang rapat tahunan yang digelar sepanjang tahun 2020 yaitu rapat *Government of Indonesia – Management Committee Representatives* (Gol-MCR) pada bulan September 2020, rapat Management Committee (MC) pada bulan Oktober 2020 dan rapat *Partnership Council* (PC) pada bulan November 2020 telah menghasilkan keputusan untuk melanjutkan Proyek PFM-MDTF ke tahap III.

Proyek PFM-MDTF III dimulai dengan diberikannya persetujuan dan arahan langsung oleh Menteri Keuangan, saat memimpin rapat *Partnership Council* tanggal 11 November 2020. Sementara itu, pengesahan dinyatakan dengan terbitnya *Grant Agreement* dengan nomor TF0B5420 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Perwakilan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Perwakilan negara Donor melalui Bank Dunia) pada tanggal 18 Mei 2021.

F.3.2. Tujuan dan Sasaran

Proyek PFM-MDTF III menitikberatkan pada tujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi.

Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam PFM-MDTF III adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
5. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
6. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

Adapun fokus utama masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam PFM-MDTF III sebagai berikut:

1. Revenue Policy and Management
 - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Expenditure Policy and Management
 - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3. Sub-National Public Resources and Management
 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- 4. Digital Technology Foundations and Platforms
 - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- 5. Enhance Gender Equality
 - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri BPKP

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri Bank Dunia Nomor TF0B5420 untuk Kegiatan <i>Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)</i> Tahap III
2	Pemberi Hibah	<i>International Bank for Reconstruction & Development</i>
3	Nama Proyek	<i>Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project</i>
4	Grand ID	TF0B5420
5	No. Register	2FPJR4SA
6	<i>Date Sign</i>	18 Mei 2021
7	<i>Date Effective</i>	18 Mei 2021
8	<i>Closing Date</i>	30 Juni 2025
9	<i>Grand Amount</i>	USD3.259.000 (ini total di Kemenkeu)
10	<i>Disbursement</i> s.d.tahun 2023	Rp879.510.728,00
11	<i>Disbursement</i> pada tahun 2023	Rp806.981.951,00
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)	Rp72.528.777,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp 97.200.000,00
	c. Belanja Modal	Rp709.781.951,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp0,00
	c. Aset Lainnya (ATB Dalam Pengerjaan)	Rp709.781.951,00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	<i>Executing Agency</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK